

Jumat, 15 Juli 2011

■ Panitia Kerja Kaji Audit BPK Opini Tidak Wajar Jadikan Pemacu

Kubu Raya. BERKAT.

DPRD Kubu Raya kemarin siang telah mengesahkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait Hasil Pemeriksaan (HP) BPK RI terhadap tata kelola keuangan Pemkab Kubu Raya yang mendapat predikat opini Tak Wajar (TW). Audit BPK RI tersebut menemukan adanya beberapa permasalahan seperti pengadaan/pembangunan aset tetap sebesar Rp9,9 miliar lebih, belum dianggarkan pada belanja modal dan penyajian aset tetap pada nera-

ca per 31 Desember 2010. Juga keterbatasan pengungkapan atas penyajian mutasi aset tetap sebesar Rp164 miliar.

"Kita harapkan meskipun Kubu Raya mendapatkan predikat opini tidak wajar bukan berarti langsung drop akan tetapi mesti menjadi pemicu, pemacu dan motivasi untuk lebih baik memperbaiki kinerja," tegas Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo, SE kemarin siang.

Harapannya dikatakan Sujiwo, di tahun mendatang Pemkab dapat mengu-

bah opini tersebut secara bertahap dari tidak wajar menjadi wajar tanpa pengecualian.

Disebutkan Sujiwo, bahwa Panja dibentuk berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2010 dengan tenggang masa kerja selama satu minggu. Panja kemudian akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang wajib ditindak lanjuti oleh Pemkab.

"Panja hanyalah untuk mencari alternatif solusi dalam upaya perbaikan

pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya pencapaian terbaik dalam pemeriksaan administrasi keuangan daerah oleh BPK," ucapnya.

Sementara itu Ketua Panja, Suprpto mengungkapkan beberapa temuan yang terjadi di Kubu Raya antara lain dari asset daerah seperti masih banyaknya bangunan sekolah yang tidak memiliki sertifikat. "Memang bukan kesalahan fatal akan tetapi harus menjadi perhatian khusus Pemkab. Karena itu kita akan mengkaji kesalahan yang terjadi yang kemudian hasilnya kita rekomendasikan ke Pemkab," ucapnya.

Menurut dia, penilaian tidak wajar ini bukan berarti setiap SKPD tidak mampu menjalankan kinerjanya melainkan masih barunya Kubu Raya sebagai kabupaten yang baru dibentuk.

"Tapi ini sebagai pembelajaran Pemkab untuk memperbaikinya," tuturnya.

Untuk pihaknya juga akan mengusulkan kepada Bupati Kubu Raya agar bisa memberikan teguran atau saran kepada setiap SKPD untuk memotivasi dalam menindaklanjuti opini dari BPK. (rob)